

## **Pemikiran Gusdur dalam Buku Islam Kosmopolitan dan Pendidikan Demokrasi**

**Humaedi**

Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini  
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah  
Jalan H. Enggus Arja No. 1 Link. Citangkil Cilegon 42443

### **Abstrak**

*Pendidikan kewarganegaraan yang demokratis untuk masyarakat Indonesia telah diselenggarakan dalam berbagai bentuk. Selama pemerintahan orde lama Soekarno, pendidikan demokrasi diterbitkan pada konsep “Bhinneka Tunggal Ika”, satu bahasa Nasional (Indonesia), semangat anti-imperialisme dan kesetiaan pada negara. Selama pemerintahan orde baru Suharto, pendidikan demokrasi dimanifestasikan dalam melalui program penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila) yang berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan “wawasan nusantara” atau cara pandang bangsa bangsa Indonesia. Gus Dur mengatakan; demokrasi itu harus take and give. Tidak ada orang yang bisa memaksa orang lain untuk menanggalkan keyakinan agamanya. Demokrasi merupakan memberikan seperangkat nilai-nilai inti demokrasi atau sikap demokratis seperti menghormati perbedaan yang masuk akal. Pendidikan demokrasi dipahami sebagai proses penyadaran individu akan hak asasi manusia. Oleh karenanya umat Islam harus mampu menegaskan bahwa Islam mendukung dan menghormati hak asasi manusia.*

**Kata Kunci:** *Pemikiran Gus Dur, Pendidikan Demokrasi, Islam Kosmopolitan,*

## **Pendahuluan**

Zaman reformasi ditandai kebebasan mimbar akademik, dan kebebasan ekspresi, yang selama bertahun-tahun disembunyikan di bawah sepatu laras pemerintah otoriter. Dengan berbagai cara dan dalam waktu lama, rakyat berusaha memperoleh hak-hak tersebut dengan berbagai resiko. Hak adalah hak. Tak boleh orang lain biarpun namanya penguasa untuk kepentingan sendiri. Dan kita akhirnya bisa memperoleh hak itu dengan merobohkan penguasa otoriter.

Tanda umum di awal zaman baru yang disebut zaman reformasi itu berupa kebebasan mengkritik secara langsung dan keras, bahkan kasar, siapa saja bisa dikritik, tanpa mengindahkan tatakrama lagi. Kritik dan ejekan bercampur aduk tak menentu, tokoh terkemuka yang semula dihormatipun digayang tanpa basa-basi.

Kemudian DPR ini lembaga luar biasa, di sana anak-anak baru yang belum pernah berpikir tentang masyarakat, belum pernah terlibat langsung menggagas masa depan *civil society* dan belum pernah ikut-ikutan memikirkan gambaran kehidupan politik sesudah rezim otoriter roboh, bersikap seperti pejuang tulen. Belum pernah terlintas dibenak mereka anak-anak baru itu untuk menampilkan suasana kehidupan demokratis yang adil dan manusiawi untuk memikirkan “masyarakat”, bangsa negara, tiba-tiba mereka menjadi anggota DPR. (Muhamad Sobary, 2010: 125-127).

Inilah demokrasi yang tumbuh di negeri ini, setelah rezim otoriter roboh dan berubah menjadi zaman reformasi yang ditandai dengan bebas mengkritik siapapun, tanpa melihat itu pejabat atau bahkan orang yang kita segani sekalipun kita gayang, tapi ini merupakan sebuah jalan menuju demokrasi yang harus kita jalani. Dalam hal ini Gus Dur merupakan tokoh penggiat demokrasi yang sudah diakui oleh beberapa tokoh seperti Franz Magnis Suseno dan lainnya, bahkan mendapatkan penghargaan karena termasuk orang yang gigih memperjuangkan demokrasi dan membela kaum tertindas. Demokrasi bagi Gus Dur merupakan keharusan karena dengan demokrasi semua agama yang ada di negeri ini akan terjaga tanpa ada saling mencurigai antara satu dengan yang lainnya.

Dalam ranah sejarah Islam, menurut Gus Dur watak kosmopolitanisme dari perbedaan Islam itu telah tampak sejak awal pemunculannya, yang dimulai dengan cara Nabi

Muhammad SAW dalam mengatur pengorganisasian masyarakat Madinah hingga munculnya para ensiklopedis Muslim awal pada abad ketiga Hijriyah dan berbagi keberhasilan perbedaan lainnya. *Kosmopolitanisme* ini bekerja dengan memantulkan proses saling menyerap dengan perbedaan-perbedaan lain di sekitar dunia Islam waktu itu, yaitu mulai dari sisa-sisa peradaban Yunani kuno yang berupa *Hellenisme* hingga peradaban anak Benua India. (Abdurahman Wahid, 2007: xxii-xxiii)

### **Kehidupan Gus Dur dalam Asuhan Keluarga**

Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. (Abu Muhamad Waskito, 2010:29). Gus Dur lahir di Denanyar Jombang 7 September 1940, riwayat perjalanan hidup anak pertama dari enam bersaudara pasangan KH. Wahid Hasyim dan Hj. Solehah ini ibarat lembaran buku yang takkan pernah habis dibaca. Beliau bukan saja seorang ulama, tapi juga budayawan, penulis, cendikiawan, pengamat sepak bola, politisi, penikmat seni, humoris, penggiat demokrasi, penganjur pluralitas, pembela kaum minoritas, dan banyak lagi. Tak aneh jika banyak orang menyambutnya sebagai guru bangsa, tokoh *pluralisme*, bapak demokrasi, pahlawan kaum tertindas bahkan *Waliyullah*. Tidak heran jika makamnya di kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, sejak hari pertama pemakamannya hingga sekarang hampir tak pernah sepi dari peziarah yang datang dari berbagai lapisan masyarakat. Serasa tak cukup kata untuk melukiskan sosok dari kiprah KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selama hidupnya.

Maka, terlepas dari eksistensinya sebagai manusia yang “*dhoif*” harus diakui, Gus Dur adalah seorang guru bangsa yang telah mengajarkan banyak hal kepada kita. Sikapnya yang santai, pernyataan-pernyataannya yang tajam mengiris dan kepeduliannya terhadap permasalahan bangsa adalah bukti betapa cucu Hadaratus Syeikh Hasyim Asy’ari ini seorang yang sulit dicari tandingannya saat ini. Beliau adalah seorang pejuang sejati yang tahu kapan harus mengibarkan bendera perlawanan dan kapan harus berdamai dengan rentangan tangan yang manaburkan *ukhuwah*. Beliau seorang totalis yang sepenuh hidupnya diabdikan untuk agama, bangsa dan negara. (Ali Masykur Musa, 2010: 3)

Walaupun Gus Dur selalu merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 4 Agustus, tampaknya teman-teman dan keluarganya yang menghadiri pesta perayaan hari ulang

tahunnya di Istana Bogor pada hari jum'at 04 Agustus 2000 tak sadar bahwa sebenarnya hari lahir Gus Dur bukanlah pada tanggal itu. Sebagaimana juga dengan banyak aspek dalam hidupnya dan juga pribadinya, ada banyak hal yang tidak seperti apa yang terlihat. Gus Dur memang pada hari keempat pada bulan kedelapan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa pada tanggal itu adalah menurut kalender Islam, yakni bahwa Gus Dur dilahirkan pada bulan Sya'ban, bulan kedelapan dalam penanggalan Islam. Sebenarnya, tanggal 4 Sya'ban 1940 adalah tanggal 7 September. Gus Dur dilahirkan di Denanyar, dekat kota Jombang, Jawa Timur di rumah pesantren milik kakek dari pihak ibunya, Kiyai Bisri Syansuri. (Greg Barton, 2002: 25-26). Saat lahir beliau sebenarnya diberi nama Abdurrahman Addakhil. *Addakhil* diambil dari nama seorang pejuang Islam di zaman Bani Umayyah yang berhasil menaklukkan Spanyol dalam rangka mengembangkan agama Islam.

Gus Dur lahir dari keluarga terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakeknya adalah KH. Hasyim Asy'ari, pendiri NU dan pahlawan nasional. Ayahnya KH. Wahid Hasyim, selain seorang ulama, adalah pejuang penggerak nasional, Menteri Agama RI yang pertama (1949), dan Pahlawan Nasional. Sedangkan kakek dari ibunya, KH. Bisri Syamsuri, juga seorang ulama dan pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Sementara, ibunya, Ny. Hj. Sholehah, adalah putri pendiri pondok Pesantren Denanyar, Jombang. (Ali Masykur Musa, 2010: 4)

### **Riwayat Pendidikan Gus Dur**

Gus Dur memulai pendidikan dasarnya dengan bersekolah di SD KRIS sebelum akhirnya pindah ke SD Mataram Perwari. Berbeda dengan anak-anak lainnya, masa kecil Gus Dur ternyata tak hanya diisi dengan bermain. Untuk memperluas pengatahuannya, sejak kecil beliau telah diajarkan membaca apa saja oleh ayahnya. Baik buku-buku agama, majalah, koran, bahkan buku-buku *non-Muslim*. Kebiasaan membaca itulah yang kemudian mendorongnya menjadi seorang kutu buku. (Ali Masykur Musa, 2010: 5)

Pada bulan April 1953, pada usia 39 tahun, KH. Wahid Hasyim, ayahnya, meninggal dunia akibat kecelakaan mobil di Bandung. Peristiwa itu rupanya sangat membekas dalam diri Gus Dur yang kala itu berusia 13 tahun, sehingga ketika tahun 1954 beliau

masuk ke Sekolah Menengah Pertama dan tidak naik kelas. Oleh ibunya, Gus Dur dikirim ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya. Tahun 1957 beliau lulus SMEP Yogyakarta, lalu pindah ke Magelang untuk memulai pendidikan Islam di Pesantren Tegal Rejo. Disinilah bakat Gus Dur mulai tampak berkembang. Beliau menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu hanya dua tahun dari yang semestinya empat tahun. Pada tahun 1959, beliau pindah ke pesantren Tambakberas di Jombang dan kemudian kemudian *nyantri* lagi di pondok pesantren Kerapyak Yogyakarta. Di Tambakberas selain melanjutkan pendidikannya, Gus Dur juga sempat menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan kemudian diangkat menjadi Kepala Sekolah Madrasah. Pada saat yang sama Gus Dur juga sambil bekerja sebagai penulis untuk majalah Sastra “Horizon” dan majalah Kebudayaan “Budaya Jawa”

Tahun 1963, Gus Dur menerima Beasiswa dari Kementerian Agama RI untuk belajar di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, pada *Departemen of Higher Islamic and Arabic Studies*. Pada bulan november 1963 beliau pun berangkat ke Mesir, meski mahir berbahasa Arab, beliau diberhentikan oleh pihak universitas bahwa harus mengambil kelas *remedial* terlebih dahulu sebelum belajar Islam dan Bahasa Arab. (Ali Masykur Musa, 2010: 6)

Seterusnya di Al-Azhar gagal dan pada tahun 1966 beliau diberi tahu oleh pihak universitas untuk mengulang pelajaran. Pada saat yang bersamaan, beliau menerima beasiswa dari Universitas Baghdad. Gus Dur pun memilih pindah ke Irak dan masuk Fakultas Sastra dan Kebudayaan Arab di Universitas di Baghdad. (Ali Masykur Musa, 2010: 7). Tahun 1970 Gus Dur menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad. Beliau kemudian pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya di Universitas Leiden. Tapi, beliau harus menelan kekecewaan karena pendidikannya di Universitas Baghdad rupanya kurang diakui oleh Universitas Leiden. Dari Belanda, Gus Dur kemudian pergi ke Jerman dan Perancis sebelum akhirnya kembali ke Indonesia pada tahun 1971. (Ali Masykur Musa, 2010: 8)

### **Usaha Gus Dur dalam Perkembangan Pendidikan Demokrasi**

Secara faktual wajah Islam dalam hubungan dengan Negara di dominasi oleh dua kelompok besar yaitu kelompok *Inklusif* dan kelompok *Eksklusif*. Kelompok pertama

berpendapat bahwa Islam seharusnya tidak menampilkan diri dalam bentuknya yang *eksklusif* dan *simbolik*. Islam harus mengintegrasikan kegiatannya dalam aktivitas bangsa secara keseluruhan. Pada kelompok ini tema-tema gerakan dan pilihan masalahnya sangat jelas, yakni apa yang dihadapi bangsa dengan agama. Sedangkan kelompok kedua berpandangan dan menginginkan ajaran Islam diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*state*). Agama diharapkan menjadi pemecah masalah sehingga paradigmanya adalah menguasai negara dengan agama. Kelompok ini ingin menampilkan wajah Islam dan mengekspresikan rasa keberagamannya dalam lingkungan kenegaraan secara utuh, meski seringkali tidak didukung substansi apapun dari agama itu sendiri.

Dari kedua kecenderungan gerakan Islam tersebut, Gus Dur adalah figur yang memelopori kelompok pertama. Ini bisa dilihat dari pandangan dan pikiran keagamaannya yang *kosmopolit-liberal*, tidak *simbolik-sekterian*. Isu *demokratisasi* yang dilontarkan dan diperjuangkan selama ini merupakan bukti dari kegelisahannya melihat masih kuatnya perilaku *sekterian* dalam gerakan Islam. (Ali Masykur Musa, 2010: 111). Dengan demokrasi, masing-masing komunitas dapat mengembangkan kreatifitas dan belajar untuk menyamakan pandangan serta bersikap dewasa dalam berpendapat. Karena itu, dalam pandangan Gus Dur perlu dilakukan saling memahami dalam kontek kedewasaan demokrasi, bukan sikap saling menyamakan atau menyeragamkan. (Ali Masykur Musa, 2010: 112). Dalam kontek ini Gus Dur mengatakan; demokrasi itu harus *take give*. (Ali Masykur Musa, 2010: 113).

Konsistensi Gus Dur untuk mengembangkan demokrasi dan toleransi dalam negara Pancasila dapat dilihat pada pembentukan Forum Demokrasi dimana beliau adalah Ketua Kelompok Kerja (Pokja) bersama-sama Romo Manguinwijaya, Frans Magnis Suseno, Harry Tjan Silalahi, Marsalim Simanjuntak, Todung Mulya Lubis dan lain sebagainya. Forum Demokrasi menyimpulkan bahwa proses pendewasaan bangsa tidak lain adalah melalui pencerdasan masyarakat lewat proses demokratisasi. (Ali Masykur Musa, 2010: 114).

Bagi kebanyakan rakyat Indonesia Gus Dur adalah seorang *humanis* yang ingin menegakkan demokrasi dan hak azasi manusia dalam arti yang sebenarnya. Apa yang

diperjuangkannya adalah nilai-nilai kemanusiaan yang tidak lagi memandang unsur-unsur *primordial*. Gus Dur teramat sadar bahwa *humanisasi* yang masih dibatasi oleh sekat-sekat *primordialisme* hanya akan menjadi ancaman bagi obyektivitas perjuangan atas nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. (Ali Masykur Musa, 2010:116). Islam bagi Gus Dur, sebagaimana halnya agama lain, adalah *doktrin* yang menjangkau nilai-nilai kemanusiaan secara universal dan menyeluruh. Dengan demikian doktrin agama yang di dalamnya menyangkut ajaran-ajaran tentang toleransi dan *harmonisasi* sosial, seharusnya mendorong seorang Muslim untuk tidak takut terhadap *Pluralisme* dan perbedaan.

Bagi Gus Dur penghayatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan adalah inti dari ajaran agama. Tanpa nilai-nilai tersebut dunia akan dipengaruhi oleh berbagai bentuk kekerasan dan konflik sosial. Penekanan pada pemahaman seperti ini semakin mengokohkan sikap humanisme yang hendak dibangunnya. Sikap Gus Dur terhadap demokrasi, *pluralisme*, wawasan kebangsaan dan hubungan agama-negara, hampir pada setiap kesempatan kembali dipertegasnya. Misalnya ketika berlangsung peluncuran Buku dan Video “*Ilusi Negara Islam, Pemilu, dan Masa Depan Indonesia*” di Ballroom Grand Melia Kuningan Jakarta. Gus Dur menegaskan bahwa tidak hanya dirinya, tapi mayoritas Muslim di Indonesia pada dasarnya adalah Muslim yang toleran terhadap perbedaan. Sejarah Islam Indonesia, ujar Gus Dur, jelas menunjukkan adanya *harmonisasi* (penyesuaian) Islam dengan konteks lokal, salah satu contoh yang paling populer adalah sikap Sunan Kalijaga yang dikenal *akomodatif* dengan kebudayaan setempat. Melalui murid-muridnya seperti Sultan Adjiwijoyo, Juru Martani dan Senopati Ing Aloga, Sunan Kalijaga, kata Gus Dur, berhasil melestarikan kebudayaan lokal; yang bahkan masih bisa dinikmati hingga saat ini. Sebaliknya sikap toleran juga ditunjukkan oleh penganut agama lain terhadap agama kehadiran Islam di Indonesia. Gus Dur mencontohkan sikap kerajaan Majapahit yang yang bercorak Hindhu-Budha, yang tetap memberi tempat bagi para penyebar Islam seperti Sunan Ampel. (Ali Masykur Musa, 2010: 120-121).

Gus Dur adalah satu dari sedikit ulama dan tokoh nasional yang konsisten memperjuangkan demokrasi dan toleransi beragama. Konsisten Gus Dur itu telah membuahkan banyak penghormatan dan penghargaan dari dalam dan luar negeri.

Penghormatan dan penghargaan terbaru diterimanya di tahun 2010 ini dari *Frist Freedom Center* atas konsistennya memperjuangkan demokrasi dan toleransi umat beragama. Organisasi itu menganugrahi Gus Dur “*Frist Freedom Award 2010*”. Penghargaan tahunan bergengsi itu diberikan kepada mereka yang dinilai gigih dalam memperjuangkan kebebasan berpikir dan penegakkan HAM bagi seluruh keyakinan, tradisi dan agama. Dan Gus Dur, sejak orde baru, konsisten dengan sikapnya membela agama *minoritas* dan terus berkampanye melawan *ekstrimisme* agama di seluruh agama. (Ali Masykur Musa, 2010: 121-122).

Bagi masyarakat Indonesia Gus Dur lebih dari sekedar tokoh NU. Beliau adalah pejuang demokrasi yang *egaliter*, *pluralis* dan *humanis*. Sedangkan bagi warga *minoritas* Gus Dur adalah sosok pembela yang berani berhadap-hadapan melawan “arus besar” demi mendukung kelompok *minoritas* dan kaum tertindas. Beliau relakan dirinya dihujat, dicaci maki, dizalimi demi pembelaan yang dilakukannya itu. Beliau hanya berpikir satu hal, hidupnya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tak heran jika Romo Franz Magnis-Suseno menyebut Gus Dur seorang *Nasionalis* Indonesia seratus persen, dengan wawasan kemanusiaan yang *universal*. Gus Dur kata Romo Magnis, enteng-enteng saja dalam segala situasi, tetapi selalu berbobot dan tak bisa peduli dengan nasib bangsanya. Gus Dur berhenti terbuka bagi semua *minoritas*, para tertindas, para korban pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Mengapa Gus Dur begitu ramah terhadap agama-agama *minoritas* tetapi sering bersikap keras terhadap agamanya sendiri, menurut Romo Magnis, justru karena Gus Dur begitu mantap dalam agama-nya. Karena itu, beliau tidak perlu *defenisif* dan tidak takut bahwa agamanya dirugikan kalau ia terbuka terhadap mereka yang berbeda. Beliau seorang demokrat dalam arti yang dalam. Beliau tidak tahan melihat seorang terinjak martabatnya. Beliau penentang kekejaman atas nama apapun. Bagi saya, tulis Romo Magnis, Gus Dur mewujudkan Islam yang percaya diri, positif, terbuka, ramah. Dengan demikian, beliau memproyeksikan gambaran yang positif tentang Islam. (Ali Masykur Musa, 2010: 122).

Dalam konteks belantara kebangsaan, masalah itu juga harus dipahami. Maka persoalan yang mendesak untuk segera dijawab adalah bagaimana melakukan upaya untuk



mencari kenegaraan yang lebih pasti akan memberikan tempat kepada agama tapi tidak mematikan yang lain. Pada umumnya jawaban terhadap persoalan ini sangat vulgar. Namun dalam perjalanan sepuluh tahun terakhir telah tercapai bentuk yang sangat baik, yaitu proses *demokratisasi* inilah yang dapat mempersatukan beragam arah kecendrungan kekuatan-kekuatan bangsa. Ini dapat mengubah keterceraiberaian arah masing-masing kelompok menjadi berputar bersama-sama menuju arah kedewasaan, kemajuan dan integritas bangsa. Jika gerakan Islam dapat memperjuangkan proses ini, beliau akan dapat menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga bagi masa depan bangsa ini. (Abdurahman Wahid, 2007: 324-325). Menurut penulis, Gus Dur mengajak kepada umat Islam untuk selalu *inklusif* bukan *eksklusif*, karena dengan *inklusif* Islam akan semakin disegani dengan agama-agama yang ada, bukan menampakan kekerasan atau yang membuat orang tidak nyaman bahkan takut dengan Islam, baik ibadah atau kegiatan yang bersifat sosial, jika semua umat manusia sudah menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai, maka kedamaian akan terwujud, atau dengan kata lain toleransi antar umat beragama, bukan saling menyamakan atau menyeragamkan.

### **Prinsip-Prinsip Pendidikan Pesantren**

Perubahan-perubahan dalam masyarakat muslim Indonesia terjadi tidak hanya pada tingkat intelektual atau pemikiran saja, namun juga pada tingkat kelembagaan pendidikan. Sejarah menjelaskan kepada kita bahwa pendidikan pada masa Rasulullah dan sahabat bukan merupakan profesi atau pekerjaan untuk menghasilkan uang atau sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupannya, melainkan sebagai upaya untuk mendekatkan diri pada Allah dan mengembangkan seruan-Nya serta menyebarkan Islam. Pada awal perkembangan pengajaran Islam, metode pengajaran dilakukan dengan cara lisan, menghafal, dan menulis. Sedangkan materi pengajaran yang disampaikan umumnya berkaitan dengan masalah Tauhid, Ibadah, dan Akhlak.

Di Indonesia, institusi pendidikan Islam di Indonesia dikenal dengan nama pesantren yang berkembang bersamaan dengan proses penyebaran Islam itu sendiri. Lembaga pendidikan Islam ini telah memberi sumbangan yang penting dan *krusial* dalam proses *tranmisi* ilmu-ilmu Islam dan juga telah memberi andil yang besar dalam proses terbentuk terbentuknya masyarakat muslim Indonesia.

Salah satu tradisi agung (*graet tradition*) dalam masyarakat Indonesia adalah tradisi pengajaran dalam Islam yang muncul di pesantren. Alasan utama munculnya tradisi pesantren adalah untuk mentranmisikan Islam tradisional yang tertulis dalam kitab-kitab klasik. Di Indonesia kitab-kitab klasik ini dikenal dengan istilah “Kitab kuning”. Tradisi pesantren bernafaskan *sufistik* dan *ubudiyah*, ibadah *fardhu* dilengkapi dengan shalat-shalat sunah, zikir, wirid, ratib. Kalangan ulama tradisional terdiri dari kitab-kitab tasawuf dan akhlak. Nabi dan *ahlul bait* sangat dimuliakan.

Konsep mata rantai yang terus berkembang kepada Nabi merupakan hal yang penting dalam Islam tradisional. Hal ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan mereka seperti pada silsilah *tarekat*, *isnad hadis*, dan juga *isnad* kitab-kitab yang dipelajari. Mata rantai tersebut merupakan jaminan keotentikan tradisi. Pigeaud dan De Graaf menyatakan bahwa pesantren merupakan pusat Islam penting kedua setelah Masjid. Menurut mereka, pesantren merupakan komunitas *independen* yang tempatnya jauh di pegunungan, dan merupakan kesinambungan tradisi dari masa pra Islam. (<http://www.reformasi-pesantren.com>)

Secara teknis, pesantren adalah “tempat dimana para santri tinggal”. Frase ini merupakan gambaran paling penting dari pesantren, yaitu sebagai suatu lingkungan pendidikan dalam pengertiannya yang menyeluruh. Pesantren mirip dengan Akademi Militer atau Biara dalam arti bahwa mereka yang ada di sana mengalami suatu kondisi totalitas. Dibandingkan dengan lingkungan pendidikan *parsial* yang ditawarkan oleh sistem pendidikan publik Indonesia sekarang, yang menjadi pendidikan umum bangsa, pesantren dengan sendirinya merupakan suatu kultur yang unik. Dalam pengertian itulah saya menyebut keunikan ini sebagai sebuah *sub kultur* dari masyarakat Indonesia. Ada tiga elemen utama yang menjadikan pesantren sebagai sebuah *sub kultur*, yaitu pola kepemimpinan didalamnya yang berada di luar kepemimpinan pemerintahan desa, literatur universalnya yang terus dipelihara selama berabad-abad, dan sistem nilainya sendiri yang terpisah dari yang diikuti oleh masyarakat luas.

Kepemimpinan kiyai di pesantren sangat unik dalam arti mempertahankan ciri-ciri *pra modern*, sebagaimana hubungan pemimpin-pengikut yang didasarkan atas sistem kepercayaan dibandingkan hubungan *patron-klien* yang semua sebagaimana diterapkan

dalam masyarakat pada umumnya. Para santri menerima kepemimpinan kiyainya karena mereka mempercayai konsep “*barokah*”, yang berdasarkan pada “*doktrin emanasi*” dari para sufi. Namun hal ini bukan satu-satunya sumber ketaatan tersebut, karena tradisi *pra-Islam*, Hindhu, Budha, mengenai hubungan guru-santri juga berperan dalam hal ini. (Abdurahman Wahid, 2007: 136-138)

Elemen dasar tersebut yaitu literatur universal yang dipelihara dan diajarkan dari generasi kegenerasi selama berabad-abad, secara langsung berkaitan dengan konsep kepemimpinan kiyai yang unik. Kitab-kitab klasik tersebut, bila dilihat dari sudut pandang masa kini, menjamin keberlangsungan “tradisi yang benar” dalam rangka melestarikan ilmu pengetahuan agama sebagaimana yang ditinggalkan kepada masyarakat Islam oleh para imam besar masa lalu. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga standar tertinggi ilmu pengetahuan agama yang dapat diraih di masa depan. Hanya dengan cara ini masyarakat Islam mampu menjaga kemurnian ajaran-ajaran agamanya. Demikianlah posisi utama dalam konsep *Ahlusunah* bagi pesantren hingga kini. (Abdurahman Wahid, 2007: 140-141)

Hakikat konsep penyebaran pengetahuan pesantren yang berdasarkan pada ketaatan penuh terhadap kandungan kitab-kitab tadi, kini menghadapi tantangan dengan adanya fakta bahwa pengetahuan agama dapat dipelajari dengan menggunakan berbagai macam cara belajar termasuk penggunaan terjemahan langsung atas kitab-kitab tersebut kedalam bahasa nasional atau setempat. Hal ini jelas mengancam peran keilmuan atau keulamaan kiyai sebagai “ilmu pengetahuan agama yang benar”, karena pandangan kitab-kitab berarti juga penyebaran paham-paham yang beraneka warna tentang kehidupan. Diperlukan adanya kajian-kajian lebih lanjut mengenai hal ini untuk mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan-perkembangan seperti yang telah digambarkan di sini terhadap karakteristik inti dan pesantren.

Elemen dasar ketiga dan pesantren adalah sistem nilainya yang unik. Berdasarkan pada ketaatan terhadap ajaran Islam dalam praktik sesungguhnya, sistem nilai ini tak dapat dipisahkan dan elemen-elemen dasar lainnya, yaitu kepemimpinan kiyai dan literatur universal yang digunakan oleh pesantren. Pengundangan ajaran-ajaran Islam secara total dan praktik kehidupan sehari-hari baik oleh para kiyai dan santri menjadi legitimasi,

baik bagi kepemimpinan kiyai dan penggunaan literatur universal hingga sekarang. Literatur yang menjadi sumber pengambilan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata merupakan arus utama dalam sistem nilai ini.

Sistem nilai yang unik ini memainkan peran penting dalam membentuk kerangka berpikir masyarakat yang dicita-citakan oleh orang-orang pesantren bagi masyarakat secara luas. Kesalahan, contohnya, adalah salah satu nilai yang sering digunakan oleh para kiyai pesantren untuk memupuk solidaritas di antara berbagai lapisan kelas sosial, sebagaimana ditunjukkan melalui cara-cara cerdas untuk *mengkonversi* perilaku yang demikian kokoh dari para bekas abangan menjadi tata cara hidup yang Islami. (Abdurahman Wahid, 2007: 142-143).

Ketiga unsur dasar pesantren tadi saling terkait satu sama lain dalam suatu pola yang sangat kompleks yang teramat rumit untuk dapat diurai. Akan tetapi, tantangan-tantangan yang datang dari luar lingkungan pesantren sendiri yang sesungguhnya menyebabkan tak dapat diuarinya saling keterkaitan tadi, dengan mengarahkan tipe unsur dasar pada perubahan-perubahan ke dalam pola-polanya sendiri. Sistem nilai ini, yang secara eksklusif berdasarkan hampir pada *barokah* kiyai, kini harus diformalkan dengan adanya diploma tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai “ijazah”.

Literatur universal yang telah digunakan selama berabad-abad ini harus bersaing dengan materi pengajaran baru yang lebih sederhana yang dipakai pada sekolah-sekolah agama negeri yang berada dalam pesantren-pesantren, sebagaimana literatur agama umum di media masa modern. Kini pimpinan kiyai tunduk pada skema-skema yang telah melembaga baik yang berasal dari dalam pesantren sendiri maupun dari luar, yang mana mau tak mau dapat mempengaruhi sifat, lingkup, dan gaya dari kepemimpinan yang sangat unik tersebut. (Abdurahman Wahid, 2007: 144-145). Pendidikan pesantren merupakan salah satu hal yang tidak bisa dilupakan dari sejarah, yang mana sistem pendidikan di Indonesia adalah yang pertama adalah pesantren, sedangkan sekolah adalah warisan dari kolonial, bila pesantren sampai saat ini masih mempertahankan kitab-kitab klasiknya (*kuning*) itu merupakan jati diri dari pesantren tersebut, bila sampai meninggalkannya berarti Indonesia telah kehilangan jati dirinya dari sistem pendidikan pesantren yang telah diterapkan bertahun-tahun lamanya, dan tidak

menafikan karakter bangsa Indonesia saat ini sangat di pengaruhi oleh latar belakang pendidikan pesantren.

### **Proses Demokratisasi**

Dalam konteks belantara kebangsaan, masalah itu juga harus dipahami. Maka persoalan yang mendesak untuk segera dijawab adalah bagaimana melakukan upaya untuk mencari bentuk kenegaraan lebih pasti akan memberikan tempat kepada agama tetapi tidak dengan mematikan yang lain. Pada umumnya jawaban terhadap persoalan ini sangat vulgar. Namun perjalanan sepuluh tahun terakhir telah tercapai bentuk yang sangat baik, yaitu proses demokratisasi. Isu *demokratisasi* inilah yang dapat mempersatukan beragam arah kecendrungan kekuatan-kekuatan bangsa. Ia dapat mengubah keterceraiberaian arah masing-masing kelompok menjadi berputar bersama-sama menuju arah kedewasaan, kemajuan dan integritas bangsa. Jika gerakan Islam dapat memperjuangkan proses ini, ia akan dapat menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga bagi masa depan bangsa ini.

Dengan demikian, proses *demokratisasi* itu dapat menjadi tumpuan harapan dari merreka yang menolak pengagamaan negara, sekaligus juga memberikan tempat untuk agama, bahwa kalau suatu masyarakat demokratis, Islam akan terjamin. Ini merupakan *appeal* atau himbauan kepada orang-orang yang fanatik yang sedang mencari identitas Islam. Sementara bagi orang yang tahu Islam dari yang seram-seram saja, demokratisasi akan menjadi jaminan perlindungan dari Islam

Namun persoalannya tinggal terpulang kepada umat Islam sendiri, apakah orang Islam sudah siap untuk demokrasi, karena demokrasi menghendaki adanya kesanggupan untuk melihat masyarakat secara keseluruhan. Sementara golongan islam ini seringkali hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Ini suatu kelemahan. Kelemahan lain, apakah golongan Islam sudah mempunyai kemampuan untuk *take and give* yang serius. Demokrasi itu isinya memberi dan menerima, tidak ada orang yang bisa memaksa orang lain untuk, misalnya, menaggalkan keyakinan agamanya dalam demokrasi. Tapi bahwa masyarakat juga memberi tempat kepada pemikiran yang bukan agama, itu juga tidak bisa dihindari. Memang begitulah demokrasi.

Ini tidak berarti bahwa umat Islam secara keseluruhan belum siap berdemokrasi. Karena tergantung mana yang dibuat umat itu. Kalau umat itu adalah para pemimpin Islam sekarang, memang belum. Tapi kalau yang dinamakan umat itu rakyat dengan tradisinya, saya rasa tidak ada masalah. Umat Islam Indonesia, sebagai rakyat yang beragama Islam, saya rasa sama, sudah matang dan sudah waktunya. Mereka sudah lama menuntut, mulai dari kemerdekaan dulu. Tapi para pemimpinnya tidak bisa menanggapi isyarat itu, sehingga yang dilakukan justru membuat isu yang sebetulnya berwawasan sempit terus, tidak melebarkan wawasan umat umat Islam. Karena itu wajar tidak sementara orang menyatakan pertumbuhan Islam kini menuju kepada “kelompok” yang *sektarian*. Menjadi suatu yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Isu semacam *pri-nonpri* maupun *kristenisasi*, sebenarnya muncul dari semangat *sektarianisme*. Padahal kita ini hidup dalam pluralisme. *Pluralisme* ini terjaga kalau ada demokrasi. Kita kaya dan kuat karena menjaga jiwa *pluralistik*.

Sampai di mana kehidupan *pluralistik* itu dapat terjaga, tergantung dua pihak besar, yaitu golongan Islam dan ABRI. Sejauhmana batas budaya demokrasi, keduanya yang menentukan. Bisa maju sepuluh langkah, mundur dua belas langkah, bahkan bisa lebih konyol. Itu yang membahayakan. Bahaya itu bisa datang dari golongan Islam yang terlalu banyak tuntutan yang eksklusif.

### **Memandang Kekutan di Luar**

Telah dikemukakan tadi bahwa proses demokratisasi akan merupakan jaminan perlindungan dari Islam sebagai agama mayoritas, baik kepada kaum “sekuler” yang menolak pengagamaan Negara maupun kepada kelompok agama lain yang selama ini merasa “ngeri” melihat kekuatan Islam. Hal ini perlu dijelaskan untuk mencegah kecenderungan kita yang senantiasa mengidentifikasi kelompok lain menjadi hanya satu model saja, yaitu sebagai kelompok yang mengancam umat Islam. Jika kecenderungan ini berlebihan, sebetulnya hanya akan menampakkan wajar rendah diri umat Islam dan pada gilirannya akan menjadi sesuatu yang kontraproduktif, bagi kekutan Islam.

Ide demokratisasi sesungguhnya tidak murni hanya berasal dari kalangan Islam, namun juga berasal dari kalangan muda Katolik dan Kristen yang risau melihat kebijakan pemimpin-pemimpin politik mereka yang berusaha menjejalkan orientasi Kekristenan dalam kehidupan negara. Ada dua pendapat di lingkungan generasi muda Katolik tentang bernegara dan hubungannya dengan umat Islam di Indonesia *pertama*, pendekatan yang sering disebut *minus malum*, yaitu mengambil alternatif terbaik dari dua pilihan yang sama-sama tidak enak. Dalam kasus Indonesia, misalnya, apakah Kristen memilih hijainya tentara atau hijainya Islam. mereka lalu memilih hijainya tentara. Namun pendekatan ini pamornya sudah merosot, makanya tidak ada pendukungnya. pendekatan ini dinilai akan berakibat menjadi kontraproduktif. *Kedua*, adalah yang kelompok yang berpendapat sebaliknya. bagi kelompok ini, hidup di Indonesia tidak bisa sekedar “mengadu” tentara dan umat Islam, karena jika dua gejala berkelahi yang menjadi korban justru pelanduk. Mereka percaya, Islam tidak berbahaya kecuali kalau di ganggu.

### **Strategi Ganda**

Uraian di atas memperlihatkan bahwa sesungguhnya banyak sekali yang dapat dijadikan partner kerja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jika kita mengembangkan pola-pola kebangsaan dengan ikut mengupayakan proses demokratisasi di segala sisi kehidupan. Oleh karena itu menurut saya, perlu ditempu strategi ganda. Biarkan ada orang yang mengurus proses formalisasi agama dalam kehidupan bernegara melalui cara-cara dan produk-produk yang nantinya menampilkan *syiar* (gebyar) Islam seperti yang tengah diperjuangkan oleh Departemen Agama, MUI, ICMI, dan sebagainya. Sementara harus ada pula yang merebut isu-isu umum yang bukan “khas Islam” untuk dikelola. Pemahaman yang utuh terhadap strategi ganda semacam ini haruslah dimiliki tanpa harus dikomunikasikan secara formal. (Abdurahman Wahid, 2007: 324-326). Setelah membaca buku Islam Kosmopolitan ternyata ada pro dan kontra antara Islam *fundamental* (fanatik) dan *moderat*, sehingga, sehingga sampai saat ini demokrasi yang terjadi tidak sempurna, seperti apa yang diinginkan oleh para *founding father* kita, khususnya rakyat Indonesia. Kurangnya sikap toleransi dan saling kepercayaan dalam mengimplementasikan demokrasi akan terjadi keretakan terhadap bangsa ini, oleh

karena itu mengapa sistem yang diterapkan Indonesia itu demokrasi? Untuk mengkomodifikasi dari semua agama yang telah ada di negeri ini.

### **Islam Kosmopolitan dan Pendidikan Demokrasi**

Watak *kosmopolitanisme* dari peradaban Islam itu sesungguhnya telah tampak sejak awal pemunculannya. Peradaban itu, yang dimulai dengan cara-cara Nabi Muhammad SAW mengatur pengorganisasian masyarakat Madinah hingga munculnya para *ensiklopedis* Muslim awal pada abad ketiga hijriyah, memantulkan proses saling menyerap dengan peradaban-peradaban lain di sekitar dunia Islam waktu itu. Yaitu, mulai dari sisa-sisa peradaban Yunani kuno yang berupa *Helenisme* hingga peradaban anak benua India. *Kosmopolitanisme* peradaban Islam itu muncul dalam sejumlah unsur dominan, seperti hilangnya batasan etnis, kuatnya *pluralitas* budaya, dan *heterogenitas* politik. *Kosmopolitanisme* itu bahkan menampakkan diri dalam unsur dominan yang menakjubkan, yaitu kehidupan beragama yang *elektik* selama berabad-abad.

Kalau ditelusuri dengan cermat perdebatan sengit di bidang teologi dan hukum agama selama empat abad pertama sejarah Islam, akan tampak secara jelas betapa beragamnya pandangan-pandangan yang dianut oleh kaum muslimin waktu itu. Jika hal itu dianggap sebagai kemelut kehidupan beragama kaum muslimin. Karena tidak adanya *konsensus* atas hal-hal dasar, maka harus juga dibaca dengan cara lain bahwa pemikiran muslim telah berhasil mengembangkan watak kosmopolitan dalam pandangan budaya dan keilmuan mereka, karena mampu saling berdialog secara demikian bebas. Kebebasan kaum Mu'tazila untuk mempertanyakan kebenaran ajaran sentral bahwa Al-Qur'an turun dalam bentuk huruf dan bahasa yang sekarang dikenal (bahasa Arab, huruf *hija'iyah*) dan menganggap kitab suci kaum muslimin tersebut diturunkan secara *maknawi* belaka, sesuatu yang sekarang tentunya dianggap sebagai sikap seorang murtad dari agama Islam. Itulah yang merupakan pertanda kuatnya watak *kosmopolitan* dari peradaban Islam waktu itu.

Pertanyaan bagaimanapun gilanya mendapatkan peluang untuk diturunkan dengan bebas waktu itu. Dalam situasi seperti itu, tidak ada bahaya apapun bagi Islam, karena proses dialog serba dialektik akan memunculkan koreksi budayanya sendiri, yang dalam



kasus *Mu'tazilah* mengambil bentuk koreksi Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi dan Al-Baqillani yang berujung munculnya secara spektakuler ilmu kalam skolastik dari kaum Suni. Koreksi itupun memperlihatkan watak *kosmopolitan*, karena ia tidak muncul sebagai hardikan atau tuntutan *legal-yuridis*, melainkan sebagai perdebatan ilmiah yang tidak mengambil sikap mengadili atau menghakimi. Baru ketika kemampuan masyarakat Islam mengambil tindakan melarang perdebatan ilmiah dan sembari memproklamasikan ajaran-ajaran *Al-Asy'ariyah* dan kawan-kawan sebagai kebenaran ajaran Islam satu-satunya, watak-watak *kosmopolitan* dari peradaban Islam mulai terputus dengan sendirinya.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *kosmopolitanisme* peradaban Islam tercapai atau berada pada titik optimal, manakala tercapai keseimbangan antara kecenderungan normatif kaum muslim dan kebebasan berfikir semua warga masyarakat (termasuk mereka yang non muslim). *Kosmopolitanisme* yang seperti itu adalah *kosmopolitanisme* yang kreatif, karena di dalamnya warga masyarakat mengambil inisiatif untuk mencari wawasan terjauh dari keharusan berpegang pada kebenaran. Situasi kreatif yang memungkinkan pencarian sisi-sisi paling tidak masuk akal dari kebenaran yang ingin dicari dan ditemukan, situasi cair yang memaksa *universalime* ajaran Islam untuk terus-menerus mewujudkan diri dalam bentuk-bentuk nyata. Namun demikian, proses tersebut bukannya nyata dalam *postulat-postulat* spekulatif belaka. (Abdurahman Wahid, 2007: 9-11).

Sebuah agenda baru dapat dapat dikembangkan sejak sekarang untuk menampilkan kembali *universalitas* ajaran Islam dan *kosmopolitanisme* peradaban Islam di masa mendatang. Pengembangan agenda baru itu diperlukan, mengingat kaum muslim sudah menjadi kelompok dengan pandangan sempit dengan sangat eksklusif, sehingga tidak mampu lagi mengambil bagian dalam kebangunan peradaban manusia yang akan muncul di masa *pasca-industri* nanti (yang sekarang sudah mulai nampak sisi pinggirannya dalam *cybernetika* dan rekayasa *biologis*). Kaum muslim kini bahkan merupakan beban bagi kebangkitan peradaban umat manusia nanti. Dalam keadaan demikian, kaum muslim hanya akan menjadi obyek perkembangan sejarah, bukannya pelaku yang bermartabat dan berderajat penuh seperti masyarakat lainnya.

Jika itu yang diinginkan, mau tidak mau haruslah dikembangkan agenda *universalisasi* ajaran Islam, sehingga terasa kegunaannya bagi umat manusia secara keseluruhan. Toleransi, keterbukaan sikap, kepedulian kepada unsur-unsur utama kemanusiaan dan keprihatinan yang penuh kearifan akan keterbelakangan kaum muslim sendiri akan memunculkan tenaga liar biasa untuk membuka belenggu kebodohan dan kemiskinan yang begitu kuat mencekam kehidupan mayoritas kaum muslim dewasa ini. Dari proses itu akan muncul kebutuhan akan *kosmopolitanisme* baru yang selanjutnya akan bersama-sama menganut faham dan ideologi yang lain, turut membebaskan manusia dari ketidakadilan struktur sosial ekonomis dan kebiadaban rejim-rejim politik yang *dzalim*.

Hanya dengan menampilkan universalisme baru dalam ajarannya dan *kosmopolitanisme* baru dalam sikap hidup para pemeluknya, Islam akan mampu memberikan perangkat sumberdaya manusia yang diperlukan oleh si miskin untuk memperbaiki nasib sendiri secara berarti dan mendasar, melalui penciptaan etika sosial baru yang penuh dengan semangat solidaritas sosial dan jiwa transformatif yang prihatin dengan nasib orang kecil. (Abdurahman Wahid, 2007: 13-14). Menurut penulis Islam telah berhasil membudayakan watak kosmopolitan yang terbukti dari zaman Nabi Muhammad sampai kepada para sahabat Nabi, *tabi'in* (pengikut) dan sampai sekarang karena mampu berdialog secara bebas tentang perdebatan ilmiah yang mengambil inisiatif untuk mencari wawasan terjauh dari keharusan berpegang pada kebenaran, sikap *sekeptis* dalam menggapai kebenaran selalu dimunculkan untuk mencari yang terbaik dari kebenaran tersebut.

### **Kesimpulan**

Gus Dur mengatakan, demokrasi itu harus *take give*, tidak ada orang yang bisa memaksa orang lain untuk menanggalkan keyakinan agamanya, tapi, bahwa masyarakat juga memberikan tempat kepada pemikiran yang bukan agama, itu juga tidak bisa dihindari. Isu semacam *pri-nonpri* maupun kristenisasi sebenarnya muncul dari semangat sekterianisme. Pluralisme terjaga kalau ada demokrasi. Kita kaya dan kuat karena menjaga jiwa *pluralistik*.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *kosmopolitanisme* peradaban Islam tercapai atau berada pada titik optimal, manakala tercapai keseimbangan antara kecenderungan normatif kaum muslim dan kebebasan berfikir semua warga masyarakat (termasuk mereka yang non muslim). *Kosmopolitanisme* seperti itu adalah kosmopolitanisme yang kreatif, karena di dalamnya warga masyarakat mengemabail inisiatif untuk mencari wawasan terjauh dari keharusan berpegang pada kebenaran. Demokrasi merupakan memberikna seperangkat nilai-nilai inti demokrasi atau sikap demokratis seperti menghormati perbedaan yang masuk akal, pandangan berbeda dan harga diri manusia kebebasan sebagai syarat warga negara untuk menciptakan masyarakat demokratis, saling menghormati kerja sama, pengakuan pentingnya hukum, dan fasilitas indifidual dalam membuat penilaian politis terhadap isu kontraversial dalam masyarakat. Niali-nilai tersebut diperlukan untuk membentuk dan mempertahankan komunitas atau masyarakat demokratis.

## Daftar Pustaka

- Barton, Greeg (2002) *Biografi Gus Dur The Authorized Biografi of Abdurahman Wahid*, Yogyakarta: LKIS, Cet. Ke-1
- Jalil, Abdul, *Reformasi Pesantren*, <http://www.acehinstitute.org/id/index.php?option=comcontent&view=article=798:reformasi-pesantren&catid=18:pendidikan&Itemid=30>
- Masykur, Ali, Musa (2010) *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, Cet. Ke-1
- Muhammad Waskito, Abu (2010) *Cukup 1 Gus Dur Saja!*, Tim Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-1
- Sobari, Muhamad (2010) *Jejak Guru Bangsa Mewarisi Kearifan Gus Dur*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-1
- Wahid, Abudarahman (2007) *Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan*, Jakarta: The Wahid Institut Seeding Plural and Peaceful Islam, Cet. Ke-1